

Studi Kebijakan Akreditasi Madrasah Dalam Tata Kelola

Peningkatan Mutu Pendidikan Islam

Siti Farihah Yulianti¹ Titi Kadi²

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji

Muhammad Idris Samarinda

farihasiti141@gmail.com, titikadi.ibrahim11@gmail.com

ABSTRACT

Islamic education plays a strategic role in shaping the character, morals, and knowledge of Muslims around the world. In the era of globalization and rapid development of information technology, the challenges faced by Islamic educational institutions are becoming increasingly complex, ranging from demands for quality improvement, governance, to educational institution policies in the eyes of society and the state. Good governance becomes the main foundation to ensure the quality and relevance of Islamic education, thus capable of producing graduates who are not only academically excellent but also possess Islamic character and are ready to face the challenges of the times. In addition to governance, the quality of Islamic education is also greatly influenced by various factors, such as human resource development, curriculum innovation, technology utilization, and community and family involvement. The main objective of this research is to examine the governance of Islamic policy studies in improving the quality and accreditation of madrasahs. Madrasahs with good accreditation do not rule out the possibility that these madrasahs already sufficiently meet accreditation standards. The findings of this research indicate that accreditation policies in madrasahs significantly influence the improvement of Islamic quality. The research method used is a descriptive qualitative approach and field research. Thru several literature reviews, several challenges were still found, such as the lack of infrastructure, limited human resource knowledge, and the uneven understanding of accreditation standards in all madrasahs.

Keywords: Islamic policy, Governance, Quality accreditation.

ABSTRAK

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moral, dan pengetahuan umat islam di seluruh dunia. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam semakin kompleks, mulai dari tuntutan peningkatan kualitas, tata kelola, hingga kebijakan lembaga pendidikan di mata masyarakat dan negara. Tata kelola yang baik menjadi fondasi utama untuk menjamin kualitas dan relevansi pendidikan Islam, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga berkarakter Islami dan siap menghadapi tantangan zaman. Selain tata kelola, kualitas pendidikan Islam juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengembangan sumber daya

manusia, inovasi kurikulum, pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan masyarakat dan keluarga. Tujuan utama dalam penelitian ini untuk mengkaji tata kelola studi kebijakan islam dalam meningkatkan mutu dan akreditasi madrasah. Madrasah yang memiliki akreditasi yang baik tidak menutup kemungkinan bahwa madrasah itu sudah cukup memenuhi standar akreditasi. Temuan dari hasil penelitian ini ialah kebijakan akreditasi pada madrasah sangat berpengaruh untuk meningkatkan kualitas Islam. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif deskriptif dan field research, melalui beberapa kajian literatur masih ditemukan beberapa tantangan seperti kurangnya sarana prasarana, keterbatasan pengetahuan sdm, serta pemahaman standar akreditasi yang belum merata di semua madrasah.

Kata Kunci, Kebijakan islam, Tata kelola, Akreditasi mutu

A. Pendahuluan

Pada era reformasi sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia, mekanisme akreditasi menjadi salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan mutu lembaga Pendidikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa akreditasi tidak hanya menjadi simbol status, tetapi juga berpotensi mendorong peningkatan kinerja lembaga apabila diimbangi dengan pengelolaan yang tepat. Kebijakan akreditasi dimaksudkan bukan sekadar sebagai bentuk legalitas administratif, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas publik dan mekanisme penguatan kelembagaan. Dalam praktiknya, akreditasi menjadi salah satu pilar reformasi pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan secara transparan, adil, dan komprehensif. Akreditasi merupakan salah satu instrumen strategis dalam sistem penjaminan mutu pendidikan nasional yang berfungsi untuk menilai dan memastikan bahwa satuan pendidikan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan secara nasional.

Dalam konteks pendidikan Islam, akreditasi madrasah memiliki peranan penting sebagai bentuk akuntabilitas publik terhadap kinerja lembaga pendidikan Islam di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Melalui akreditasi, madrasah diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola, kurikulum, sumber daya manusia, dan hasil belajar peserta didik secara berkelanjutan. Selain itu, kebijakan akreditasi turut memperkuat integrasi antara aspek spiritual dan akademik dalam pengelolaan madrasah, mengingat tujuan pendidikan Islam tidak hanya menekankan kompetensi intelektual, tetapi juga pembentukan karakter religius peserta didik. Dalam konteks ini, akreditasi berfungsi sebagai instrumen yang menilai kesesuaian lembaga terhadap Standar Nasional Pendidikan serta nilai-nilai Islam yang menjadi landasan pendidikan madrasah.

Kebijakan akreditasi madrasah menumbuhkan budaya mutu (*quality culture*) di lingkungan pendidikan Islam. Budaya mutu ini tercermin dalam pola kerja kolaboratif antara kepala

madrasah, guru, dan tenaga kependidikan yang berorientasi pada peningkatan hasil belajar dan kepuasan peserta didik. Dalam jangka panjang, akreditasi diharapkan menjadi bagian dari *organizational learning process* yang memperkuat kemampuan adaptif lembaga terhadap perubahan zaman, terutama dalam konteks digitalisasi dan globalisasi pendidikan Islam.

Secara umum, hasil dalam penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan peningkatan mutu dan akreditasi madrasah telah berkontribusi nyata terhadap kualitas pendidikan Islam melalui peningkatan kinerja guru, penguatan tata kelola, serta sistem penjaminan mutu pembelajaran. Meskipun demikian, tantangan utama yang masih dihadapi meliputi kesenjangan mutu antar wilayah, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya pendampingan intensif dari kemenag. Oleh karena itu, strategi pendampingan yang adaptif dan kolaboratif diperlukan agar kebijakan akreditasi dapat diterapkan dan dikelola secara berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model studi kebijakan pendidikan Islam, yang bertujuan memahami secara mendalam terkait tata kelola kebijakan studi islam dalam konteks peningkatan mutu dan akreditasi madrasah. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali makna pendidikan islam, tata kelola dan, akreditasi mutu, serta pelaksanaan kebijakan di lapangan. Jenis dan

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis. Peneliti berusaha menggambarkan dan menganalisis terkait studi kebijakan pendidikan islam dalam tata kelola peningkatan mutu dan akreditasi madrasah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Tata Kelola Akreditasi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam

Tata kelola pendidikan Islam adalah pengelolaan lembaga pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada aspek rasional dan manajerial, tetapi juga menekankan integrasi nilai-nilai spiritual, moral, dan etika Islam. Tata kelola pendidikan Islam bertujuan untuk mengarahkan pertumbuhan dan kegiatan lembaga pendidikan agar seimbang antara pengembangan kognitif, afektif, dan spiritual peserta didik.

Tata kelola ini mendukung kemandirian, kreativitas, dan inovasi, serta adaptasi terhadap perubahan zaman, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kepemimpinan, manajerial Islami, dan etika kerja yang kuat. Esensi tata kelola pendidikan Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara pemikiran rasional dengan nilai-nilai spiritual, penguasaan akal dalam tradisi ilmu pengetahuan perlu diseimbangkan dengan keteguhan spiritualitas. Fondasinya haruslah mengadopsi pendekatan komprehensif pada pengembangan kognitif, memprioritaskan pertumbuhan afektif terutama nilai-nilai dan

sikap serta tindakan dalam penerapan nyata.

Lembaga pendidikan Islam mempunyai keunikan tersendiri dan yang membedakannya dari lembaga pendidikan umum, terutama dalam hal kebijakan dan kurikulum yang menekankan integrasi ilmu agama dan umum. kurikulum di lembaga pendidikan Islam mencakup mata pelajaran keagamaan seperti bahasa arab, fiqih, aqidah, serta pembelajaran Al-qur'an dan hadits yang dijadikan sebagai inti pengajaran.

Selain itu, nilai-nilai Islam seperti akhlak, adab, dan spiritualitas sangat diutamakan dalam keseharian, sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang lebih komprehensif, mengintegrasikan ilmu duniawi dan ukhrawi. Nilai-nilai Islam dapat mendukung kualitas islam itu sendiri. Nilai amanah (kepercayaan) misalnya, mengajarkan setiap pihak dalam pendidikan untuk bertanggung jawab terhadap mutu pendidikan, baik dalam pengelolaan maupun proses pembelajaran. Prinsip ihsan (kualitas terbaik) menuntut agar setiap tindakan dalam pendidikan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, prinsip adil (keadilan) menekankan pentingnya distribusi yang merata dalam layanan pendidikan, evaluasi, dan kesempatan belajar bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Jadi, ketiga nilai tersebut menjadi dasar yang kuat untuk memastikan bahwa penjaminan mutu bukan hanya memenuhi standar formal, namun juga sejalan dengan ajaran moral dan spiritual agama Islam .

Madrasah merupakan kegiatan yang penting dalam dunia pendidikan, hal tersebut dikarenakan kegiatan akreditasi mempunyai fungsi dan manfaat yang besar bagi kelangsungan pendidikan. fungsi pendidikan dibedakan menjadi 3, yaitu: 1) fungsi pengetahuan: fungsi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sekolah telah melaksanakan standar-standar yang ditetapkan dalam bidang pendidikan dan bagi sekolah akan memperoleh pengetahuan tentang kelemahan dan kekurangan kinerjanya selama 5 tahun terakhir. 2) fungsi akuntabilitas, tujuannya agar sekolah dapat mempertanggung jawabkan terkait pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna, dan, 3) peningkatan kualitas tujuannya agar sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan dari hasil akreditasi.

Akreditasi dimaknai sebagai suatu proses untuk memberikan penilaian terhadap kualitas menggunakan kriteria mutu yang sudah ditetapkan. Akreditasi dapat diartikan sebagai suatu proses, yang meliputi penilaian profesional untuk mengevaluasi bahwa suatu lembaga pendidikan tersebut memenuhi standar yang sudah ditentukan atau tidak. Proses dari akreditasi yaitu dilakukan dengan cara objektif mengenai kelayakan dan kinerja sekolah. Sekolah dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Sekolah juga dapat berupaya meningkatkan mutu dengan melihat dari evaluasi kegiatan dan akreditasi dilakukan untuk

sekolah yang sudah sesuai dengan kesiapan. Adanya akreditasi dapat memetakan mutu pendidikan berdasarkan Standar Nasional. Pendidikan serta menjadi acuan dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan sekolah.

Dalam penelitian sebelumnya peneliti mengemukakan hasil dari penelitiannya, bahwa akreditasi sebenarnya tanggung jawab dari lembaga pemerintahan, karena akreditasi bisa sebagai bentuk perlindungan konsumen. Oleh karena itu pemerintah telah menetapkan Badan Akreditasi Madrasah. Dengan demikian dapat diartikan sebagai proses pengakuan kualifikasi lembaga pendidikan melalui pengukuran dan penilaian kinerja sekolah dengan mengajukan perangkat yang telah ditetapkan. Melalui proses akreditasi sekolah juga harus didukung oleh pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat. Sekolah yang mampu mengembangkan program-program akreditasi tentunya tidak lepas dari sebuah perencanaan.

2. Komponen-komponen Tata

Kelola Kebijakan Pendidikan Islam dalam meningkatkan mutu dan akreditasi madrasah

Komponen tata kelola kebijakan akreditasi, diantaranya:

a) Perencanaan Strategis yang mana sebagai langkah awal dalam fungsi manajemen yang menentukan arah strategis, tujuan, dan langkah-langkah untuk mencapainya. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, perencanaan memiliki dimensi yang lebih luas karena harus mencakup integrasi antara nilai-nilai Islam dengan standar pencapaian akademik.

b) Pengorganisasian Sumber Daya, merupakan suatu proses struktural yang bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya, mendefinisikan peran dan tanggung jawab, serta menyusun mekanisme koordinasi guna mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam pengorganisasian tidak hanya bertokus pada efisiensi operasional, namun juga pada integrasi nilai-nilai Islam ke dalam struktur dan fungsi organisasi.

c) Partisipasi: Tata kelola umumnya mengacu pada koordinasi komponen atau faktor yang mendukung tercapainya tujuan organisasi melalui penguatan sumber daya manusia.

d) Efektivitas dan Efisiensi: Efektivitas adalah kemampuan lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi adalah kemampuan lembaga pendidikan untuk menggunakan sumber daya secara optimal.

Meskipun mengikuti beberapa komponen diatas namun pada kenyataannya dalam melakukan akreditasi sekolah tidak berjalan dengan mudah karena banyak permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang sering terjadi seperti persiapan yang kurang, bukti fisik yang belum cukup, panduan belum lengkap, dan lainnya. Selain itu sekolah tidak memiliki waktu untuk melakukan evaluasi diri serta kurangnya koordinasi dan komunikasi antar individu maupun tim berkelompok.

Peningkatan akreditasi sekolah sangat penting dilakukan. dari tahun ke tahun.

Pihak Sekolah mempersiapkan dengan baik semua hal yang diperlukan dalam akreditasi sekolah, mulai dari tahap perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan akreditasi sekolah. Dengan adanya akreditasi setiap, program-program sekolah bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Hasil akreditasi memberikan dampak yang signifikan terhadap madrasah itu sendiri, baik dari segi pendidik, peserta didik maupun sarana prasarana serta manajemen madrasah atau sekolah tersebut. Predikat akreditasi yang diperoleh sekolah mendorong kepala sekolah dan staf pengajar untuk terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan yang diberikan. Program pelatihan guru, pengembangan kurikulum, serta peningkatan fasilitas pendidikan menjadi prioritas utama. Namun, salah satu tantangan yang muncul adalah tekanan administratif yang besar dalam memenuhi dokumen dan standar yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi.

Meskipun pengelolaan akreditasi sangat penting, hal ini mengalihkan fokus guru dari tugas utama mereka, yaitu tekanan administratif yang berkelanjutan dan mengurangi waktu yang seharusnya digunakan untuk pengajaran yang lebih personal, yang sejatinya lebih berdampak langsung terhadap perkembangan akademik dan karakter siswa. Dalam konteks akreditasi, hal ini termanifestasi sebagai fokus berlebihan pada pemenuhan indikator administratif daripada pencapaian tujuan inti

peningkatan mutu pendidikan dan relevansi lulusan, yang mana karena adanya sistem insentif yang lebih menekankan reward terhadap pencapaian status akreditasi daripada improvement yang terukur.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pentingnya penguatan keimanan dan pemahaman tentang islam, karena di dalam islam itu sendiri banyak hal yang dipelajari, baik dari untuk sesama manusia maupun makhluk lainnya, serta pentingnya keikhlasan seorang guru dalam mendidik. Peningkatan kualitas pembelajaran setelah akreditasi lebih banyak dirasakan dalam hal perbaikan sarana dan prasarana, namun belum diimbangi dengan pembaruan yang signifikan dalam metode pengajaran yang diterapkan di kelas. Akreditasi, dalam konteks ini, tampaknya lebih berfokus pada evaluasi administratif dan bukan pada pengembangan pedagogis yang lebih mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akreditasi dapat mendorong perbaikan pada struktur dan pengelolaan, pengaruhnya terhadap kualitas pembelajaran memerlukan waktu yang lebih panjang dan keterlibatan lebih aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, temuan ini menyoroti perlunya evaluasi yang lebih holistik terkait dampak akreditasi terhadap kualitas pengajaran, yang tidak hanya mengukur hasil administratif tetapi juga hasil pembelajaran yang nyata di kelas.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menemukan beberapa hasil dari penelitian sebelumnya yang

menjelaskan bahwa faktor pendukung keberhasilan kebijakan ini meliputi komitmen pimpinan madrasah, staff tenaga kependidikan, lingkungan sarana prasarana dan dukungan kebijakan kemenag, serta keterlibatan aktif wali santri. Sementara itu, kendala utama yang dihadapi madrasah ialah keterbatasan pendanaan, rendahnya literasi mutu sebagian tenaga pendidik, serta belum optimalnya sistem pendampingan akreditasi berkelanjutan.

Dengan Demikian peneliti menganalisa bahwa akreditasi lembaga pendidikan bukan hanya menjadi urusan internal sekolah atau madrasah semata, tetapi memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk yayasan dan komunitas di sekitarnya. Lembaga pendidikan berbasis pesantren seperti, madrasah diniyah keberadaan yayasan dan komunitas pesantren memiliki posisi strategis dalam menopang proses akreditasi. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pemilik atau penanggung jawab struktural, tetapi juga sebagai motor penggerak partisipasi, moralitas, serta legitimasi sosial dari proses tersebut. Di tengah berbagai keterbatasan yang dihadapi, peran aktif dari yayasan dan komunitas sekitar terbukti menjadi faktor penting dalam menyukseskan tahapan-tahapan akreditasi.

Secara struktural, madrasah memiliki tanggung jawab langsung terhadap keberlanjutan dan pengakuan formal lembaga. Dalam proses akreditasi, yayasan berperan sebagai fasilitator utama dalam menyediakan kebutuhan administratif maupun

logistik. Selain itu, yayasan menjadi penghubung antara madrasah dan tokoh masyarakat sekitar untuk melegitimasi sosial terhadap keberadaan lembaga. Hal ini penting, mengingat madrasah berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem sosial dan spiritual di lingkungan pesantren yang lebih luas. Dukungan yayasan membuktikan bahwa keberhasilan akreditasi dengan dukungan ini mencerminkan adanya pemahaman kultural bahwa keberhasilan lembaga pendidikan tidak hanya ditentukan oleh penilaian administratif, tetapi juga oleh ridha dan keberkahan para guru dan ulama. Legitimasi sosial di sini bukan hanya didasarkan pada rasionalitas birokratis, tetapi juga pada nilai-nilai tradisi, keikhlasan, dan kebermanaan spiritual. Selain itu, faktor politik dan kebijakan pemerintah daerah.

Dukungan anggaran dan kebijakan daerah terhadap madrasah masih belum merata, sehingga proses akreditasi sering kali tidak berjalan optimal. Dalam beberapa kasus, koordinasi antara Kantor Kementerian kebijakan akreditasi telah memperkuat fungsi *accountability* lembaga pendidikan Islam di bawah binaan Kementerian Agama (Kemenag). Evaluasi berbasis standar nasional pendidikan menjadikan madrasah lebih adaptif terhadap perubahan kurikulum, lebih terbuka terhadap inovasi pembelajaran, serta lebih transparan dalam pengelolaan lembaga. Akreditasi juga berfungsi sebagai media untuk mengukur sejauh mana lembaga pendidikan Islam mampu

mengintegrasikan aspek spiritual dan akademik dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, dalam meningkatkan mutu dan akreditasi lembaga maka diperlukan pengelolaan yang optimal berdasarkan kebijakan pendidikan islam yang mana kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari capaian akademik peserta didik, tetapi juga dari penguatan karakter religius dan moralitas Islam.

E. Kesimpulan

Kesimpulan dari isi penelitian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa kebijakan tata kelola madrasah dalam tata kelola pendidikan islam untuk meningkatkan mutu dan akreditasi madrasah itu sangat berkaitan satu sama lain, dimana madrasah yang berkembang dan mampu menjadikan madrasah yang penuh dengan nilai-nilai islam maka untuk mencapai akreditasi madrasah atau sekolah hanya perlu mengupgrade hal-hal yang berkaitan dengan konsep pembelajaran, manajemen madrasah, sarana dan prasarana madrasah, serta tempat pembelajaran yang bersih dan rapi, mempunyai visi misi yang seimbang, dan saling bekerja sama antara pihak sekolah maupun masyarakat.

Kemudian untuk dampak dari peningkatan mutu dan akreditasi yang mana keduanya saling berkontribusi, akreditasi mendorong madrasah untuk memenuhi dan meningkatkan standar nasional pendidikan, seperti kurikulum, proses pembelajaran, penilaian serta kompetensi kelulusan. Sedangkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan, dalam

proses akreditasi, kualifikasi dan kompetensi guru menjadi perhatian utama, yang disusul dengan perbaikan manajemen dan tata kelola madrasah, karena akreditasi menuntut administrasi yang tertib, perencanaan yang jelas, serta pengelolaan madrasah yang transparan. Jadi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam status dan peringkat akreditasi menjadi tolak ukur kualitas madrasah dimata masyarakat. Karena madrasah yang terakreditasi A atau B cenderung lebih dipercaya oleh orang tua untuk menyekolahkan anak nya di sekolah tersebut. yang diperoleh dalam penelitian dan saran perbaikan yang dianggap perlu ataupun penelitian lanjutan yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Baharuddin, B., dkk. (2022). *Studi kebijakan pendidikan agama islam*. Malang: Media Nusa Creative.
- Evinda, A. A., dkk. (2023). *Studi kebijakan pendidikan islam*. Malang: Edulitera.
- Kasran, S., dkk. (2024). *Manajemen mutu pendidikan islam: Sistem, inovasi, evaluasi, dan pengembangannya*. Samarinda: UINSI Press.
- Kholis, N. (2022). *Total quality management pendidikan islam*. Jakarta: Penerbit NEM.
- Sallis, E. (2011). *Total quality management in education (Manajemen mutu terpadu pendidikan)* (A. Riyadi, Trans.). Jogjakarta: IRCiSoD.

Jurnal :

- Azizah, L., & Witri, S. (2021). Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Penerapan Total Quality Management dalam Program Akreditasi Sekolah. *Guru: Jurnal Pengajaran dan Pembelajaran*, 1(1), 69-78. doi:10.35878/guru.v1i1.263
- Irma, D. (2025). Peran Akreditasi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Tinggi: Kajian Kebijakan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 513-520.
- Salas, M. K., & Murtadho, M. I. (2023). Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Peningkatan Mutu dan Standarisasi (Akreditasi) Pendidikan Islam Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 26-33